

**PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

SILABUS

Mata Kuliah : Kebijakan Publik Berbasis Evidens

Dosen :

Wahyudi Kumorotomo (Prof.Dr.MPP.)

Erwan Agus Purwanto (Prof.Dr.MSi)

LATAR BELAKANG

Di sebagian besar program S1 administrasi negara, administrasi publik atau manajemen dan kebijakan publik, mahasiswa sudah mendapatkan kuliah kebijakan publik (*public policy*), terutama aspek-aspek teoretisnya. Namun bekal teoretis tersebut seringkali belum cukup untuk memahami praktik perumusan kebijakan publik yang sesungguhnya. Perbedaan yang mencolok antara apa yang diperoleh di dalam teori-teori kebijakan publik dengan praktik yang diamati di dalam praktik menjadi sumber frustrasi dan persoalan tersendiri di negara-negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia, akibat budaya menyajikan bukti faktual atau *evidence* yang masih rendah diantara para perumus kebijakan. Kecuali itu, diantara masyarakat sendiri budaya untuk melihat bukti-bukti secara objektif masih belum cukup kuat sehingga penilaian terhadap hasil-hasil kebijakan seringkali masih sangat parsial, subjektif, dan sarat dengan kepentingan sesaat. Mata-kuliah ini dimaksudkan untuk membekali para mahasiswa yang sedang atau akan menjadi praktisi kebijakan agar terbiasa melakukan penilaian atau evaluasi kebijakan dengan *evidence* yang kuat, sehingga mereka akan mampu meningkatkan kualitas kebijakan publik secara sistematis dan berkesinambungan.

Secara umum, kuliah ini terdiri dari dua bagian, yaitu: 1) Latar (*context*) dan 2) Isi (*content*). Di bagian latar, para mahasiswa akan memperoleh gambaran tentang pentingnya *evidence* dalam kebijakan publik namun pada saat yang sama dihadapkan pada dilema karena penghargaan yang sedikit mengenai *evidence* di negara-negara demokrasi baru seperti di Indonesia. Perubahan pola berpikir yang diharapkan dalam diskusi-diskusi di kelas pada bagian tersebut diharapkan akan mendorong para mahasiswa untuk lebih antusias memahami isi, yang merupakan bagian kedua dari kuliah berupa pemahaman *evidence* atau bukti-bukti faktual yang menjadi penunjang pokok bagi produk kebijakan yang lebih baik. Dengan demikian, mahasiswa didorong bukan saja untuk terlatih menggunakan metode-metode analisis kebijakan yang lebih baik, tetapi juga menggunakan metode-metode tersebut secara konsisten, terbiasa melakukan verifikasi data dan informasi, serta menyertai penyajian alternatif kebijakan dengan bukti-bukti yang objektif.

Agar kuliah dapat berjalan secara inter-aktif, para mahasiswa diharapkan aktif mencari sumber referensi secara mandiri. Selain sumber-sumber referensi yang sudah terdapat di dalam silabus, para mahasiswa diharapkan menggali sumber-sumber informasi yang lain, baik melalui Internet, kumpulan artikel, serta tulisan-tulisan aktual yang mungkin diangkat sebagai kasus dalam diskusi di kelas.

SISTEM EVALUASI

Evaluasi terhadap karyasiswa peserta kuliah ini didasarkan pada tiga kriteria pokok, yaitu:

1. Partisipasi di dalam diskusi kelas
2. Pembuatan kertas-kerja atau tugas individual
3. Ujian semester.

RENCANA KULIAH

No.	Topik Perkuliahan	Bacaan Utama
1.	Pengantar Kuliah Dalam sesi awal ini, kuliah menjelaskan silabus dan beberapa kesepakatan tentang sistem perkuliahan serta pendekatan yang akan dipakai di dalam membahas kebijakan publik pada tingkat nasional maupun daerah.	Silabus
2.	Pentingnya Bukti (<i>Evidence</i>) dalam kebijakan publik: Membahas tentang kegagalan kebijakan publik dan berbagai masalah dalam politik dan perumusan kebijakan di Indonesia.	Bogenscheider & Corbett (2010) Ch.2-4 Purwanto (2014), Ch.1
3.	Jenis-jenis <i>Evidence</i> dalam Kebijakan Publik. Berbagai <i>evidence</i> yang sering dipakai oleh perumus kebijakan dibahas dalam sesi ini. Juga dijelaskan mengenai konsekuensi dari penggunaan masing-masing bukti tersebut (fakta, interpretasi, opini) dalam perumusan kebijakan publik.	Cartwright & Hardie (2012), Ch.3 Kumorotomo (2014), Ch.4.
4.	Siklus kebijakan: peran aktor, peneliti, dan advokasi kebijakan Sesi ini menguraikan tentang siklus kebijakan secara teoretis maupun dalam praktik di Indonesia. Namun berbeda dengan pendekatan yang biasa dianut, setiap tahapan dalam siklus kebijakan dipahami sebagai titik pembuatan kebijakan politik yang dapat dipengaruhi oleh <i>evidence</i> .	Parkhurst (2017), Ch.5

5.	<p>Perumusan kebijakan dalam sistem yang terdesentralisasi. Membahas tentang konsekuensi dari perumusan kebijakan publik dalam sistem yang demokratis dan terdesentralisasi. Aspek positif dan negatif dari sistem yang terdapat di Indonesia ini dibahas dengan contoh-contoh kasus.</p>	Kumorotomo (2008), Ch.6
6.	<p>Penggunaan <i>Evidence</i>: Politik Kebijakan dan Politik Disinformasi Masalah pokok yang dihadapi dalam era Industri 4.0 adalah bahwa objektivitas dari bukti-bukti yang digunakan menjadi semakin sulit diperoleh, apalagi jika tidak disertai kematangan sikap dari warga yang mencari sumber-sumber informasi sekunder.</p>	O'Connor & Weatherall (2018), Ch.1-4, Ch.8. Schwab (2017), Ch. 7
7.	<p>Ujian Midterm</p>	
8.	<p>Evaluasi Kebijakan dan Sistem Pemanfaatan Data dan Informasi Menguraikan tentang dasar-dasar evaluasi kebijakan, program dan proyek dengan memanfaatkan data yang tersedia di lembaga-lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun komunitas dan masyarakat.</p>	Royse, Thyer & Padgett (2006), Ch.2-4.
9.	<p>Sumber dan Pemanfaatan Data Kebijakan Mendiskusikan tentang ketersediaan data bagi pendukung bukti faktual rumusan kebijakan di Indonesia. Juga akan dibahas secara kritis masalah metodologi dalam pengumpulan data dan pemanfaatannya bagi kebijakan publik.</p>	Purwanto et al (2014), Ch.5-6.
10.	<p>Penilaian Program: Efficiency, Efficacy, Effectiveness Dengan menggunakan kasus-kasus konkret yang diperoleh dari sumber primer maupun sekunder, sesi ini membahas tentang masalah pokok dalam penilaian program, dari segi efisiensi, efikasi, maupun efektivitas.</p>	Royse, Thyer & Padgett (2006), Ch.4-8

	Mahasiswa diharapkan memaparkan beberapa kasus aktual untuk dibahas di kelas.	
11.	Verifikasi Metode Berdasarkan kasus-kasus yang konkret di Indonesia, sesi ini membahas tentang verifikasi metode untuk menyajikan <i>evidence</i> dalam analisis kebijakan publik, baik metode kualitatif maupun kuantitatif.	Stoker & Evans (2016), Ch.5
12.	Evidence dalam Ekosistem Digital: Big Data dan Kebijakan Publik Membahas kompleksitas penggunaan teknologi digital dalam penyajian <i>evidence</i> . Dengan contoh-contoh proses perumusan kebijakan publik yang riil, akan dibahas tentang konsekuensi besar bagi penggunaan Big Data dalam kebijakan publik.	Schwab (2017), Ch.5-7
13.	Pertanggungjawaban Analisis Kebijakan Membahas tentang peran institusi pembuat advokasi, pemikir dan peneliti (<i>think-tanks</i>) dalam sistem kebijakan publik, terutama dari segi peningkatan integritas dan pertanggungjawaban kepada publik.	Bogenschneider & Cobett (2010), Ch.8
14.	Refleksi: Sistem Penilaian dan Evaluasi Kebijakan Yang Objektif Sesi penutup ini akan menjadi refleksi bagi para mahasiswa tentang penilaian bukti faktual secara objektif untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik di dalam lembaga-lembaga pemerintah.	Pawson (2006), Ch.9

DAFTAR REFERENSI

1. Bogenschneider, K. & Corbett, T.J. (2010). *Evidence-Based Policy Making: Insights from Policy-Minded Researchers and Research-Minded Policymakers*. Taylor and Francis: New York.
2. Cartwright, N. & Hardie, J. (2012). *Evidence-Based Policy: A Practical Guide To Doing It Better*. Oxford University Press: London.

3. Kumorotomo, W. ed. (2014). *Bureaucracy and Policy Making in Indonesia*. Gava Media: Yogyakarta.
4. Kumorotomo, W. (2008). *Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perumusan Kebijakan di Indonesia 1974-2004*. Prenada Media: Jakarta.
5. O'Connor, C. & Weatherall, J.O. (2018). *Misinformation Age: How False Beliefs Spread*. Yale University Press: New York.
6. Parkhurst, J. (2017). *The Politics of Evidence: From Evidence-Based Policy to the Good Governance of Evidence*. Routledge: New York.
7. Pawson, R. (2006). *Evidence-Based Policy: A Realist Approach*. Sage Publishing: Boston.
8. Purwanto, E.A., et al (2015). *Mengembangkan Profesi Analis Kebijakan*. Penerbit Gava Media: Yogyakarta.
9. Royse, D., Thyer, B.A. & Padgett, D.K. (2006). *Program Evaluation: An Introduction to An Evidence-Based Approach*. Cengage Learning: Boston.
10. Schwab, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution*, World Economic Forum: Copenhagen.
11. Stoker, G. & Evans, M. eds. (2016). *Evidence-Based Policy Making in the Social Science: Methods That Matter*. Policy Press: Bristol.
